

ASPEK HUKUM PENYELENGGARAAN IMUNISASI

DAN

ASAS KEMANFAATAN

TESIS

**Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata 2 Magister Hukum
Konsentrasi Hukum Kesehatan**



**OLEH :
WANA FICKY SARI
NIM : 18.C2.0036**

**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER HUKUM KESEHATAN
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2021**

HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wana Ficky Sari
Program Studi : Hukum Kesehatan
Fakultas : Hukum dan Komunikasi
Jenis Karya : TESIS

Menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Hak Bebas Royalti Noneklusif atas karya ilmiah yang berjudul “Aspek Hukum Penyelenggaraan Imunisasi dan Asas Kemanfaatan” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Katolik Soegijapranata berhak menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 27 April 2021

Yang menyatakan



Wana Ficky Sari



HALAMAN PENGESAHAN

Judul Tugas Akhir: : Aspek Hukum Penyelenggaraan Imunisasi dan Asas Kemanfaatan

Diajukan oleh : Wana Ficky Sari

NIM : 18.C2.0036

Tanggal disetujui : 27 April 2021

Telah setuju oleh

Pembimbing 1 : Prof.Dr. Wila Ch. Supriadi S.H.

Pembimbing 2 : Hadi Susiarno

Penguji 1 : Prof.Dr. Wila Ch. Supriadi S.H.

Penguji 2 : Hadi Susiarno

Penguji 3 : Dr. Y. Endang Wahyati S.H., M.H.

Ketua Program Studi : Dr. Y. Endang Wahyati S.H., M.H.

Dekan : Dr. Marcella Elwina Simandjuntak S.H., CN., M.Hum.

Halaman ini merupakan halaman yang sah dan dapat diverifikasi melalui alamat di bawah ini.

sintak.unika.ac.id/skripsi/verifikasi/?id=18.C2.0036

TESIS

ASPEK HUKUM PENYELENGGARAAN IMUNISASI DAN ASAS KEMANFAATAN

DISUSUN OLEH
WANA FICKY SARI
NIM : 18.C2.0036

telah disetujui oleh:

Pembimbing I,



Prof. Dr. Wila Chandrawila Supriadi, SH

Tanggal: 27 April 2021

Pembimbing II,



Dr. dr. Hadi Susiarno, Sp. OG(K), M.Kes, MH.Kes.

Tanggal: 27 April 2021

**LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**

Nomor : 0047 /SK.Rek/X/2013

Tanggal : 07 Oktober 2013

Tentang : PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis yang berjudul :

“ASPEK HUKUM PENYELENGGARAAN IMUNISASI DAN ASAS
KEMANFAATAN”

Ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa tesis ini sebagian atau seluruhnya merupakan *hasil plagiasi*, maka saya rela untuk dibatalkan, dengan segala akibat hukumnya sesuai peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/ atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semarang, 27 April 2021



(Wana Ficky Sari)
NIM : 18.C2.0036

*) : *hilangkan yang tidak sesuai*

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada TUHAN YANG MAHA KUASA atas terselesaikannya penulisan Tesis ini, hanya karena kehendakMulah, dapat diselesaikan Tesis dengan judul **“Aspek Hukum Penyelenggaraan Imunisasi dan Asas Kemanfaatan”**.

Meskipun karya ilmiah ini merupakan hasil kerja maksimal, namun disadari akan ketidaksempurnaan dari tesis ini, baik dari segi bentuk maupun dari segi isinya. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan dan keilmuan yang dimiliki. Untuk itulah, kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan untuk meningkatkan mutu karya ilmiah ini.

Ucapan terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu dan memberikan kontribusi bagi terselenggaranya penelitian serta terwujudnya tesis ini khususnya, kepada:

1. Dr. Y. Endang Wahyati, S.H., MH selaku Ketua Jurusan Program Studi Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Program Pascasarjana Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang selalu memberikan arahan dan dukungan dalam selama penulisan tesis ini dan telah memberikan kesempatan untuk mengikuti Program Studi Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Program Pascasarjana Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;
2. Prof. Dr. Wila Chandrawila Supriadi, S.H., CN., selaku guru dan pembimbing utama, serta cendekiawan hukum yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan dan pencerahan tentang hukum, baik dalam kegiatan perkuliahan maupun dalam menyelesaikan tesis ini;
3. Dr. dr. Hadi Susiarno, Sp.OG(K), M.Kes, MH.Kes., selaku pembimbing pendamping yang telah banyak memberikan bimbingan, baik dalam kegiatan perkuliahan maupun dalam menyelesaikan tesis ini;
4. Joni Minulyo, S.H., M.H., selaku penguji tesis yang telah banyak memberikan saran dan masukan bagi penyelesaian tesis ini;
5. Para Dosen Pengajar Program Studi Magister Hukum Konsentrasi Hukum

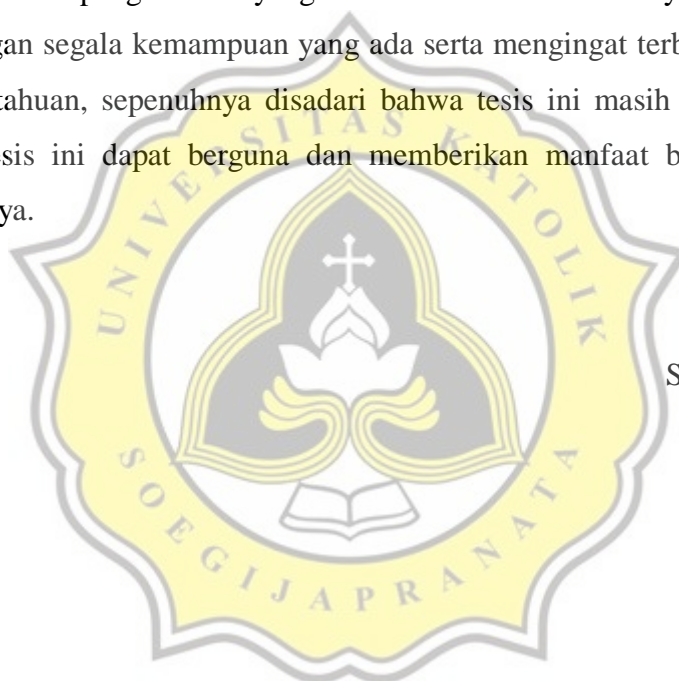
Kesehatan Program Pascasarjana Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang telah memberikan materi kuliah selama ini yang sangat berguna bagi terselenggaranya penelitian dan terwujudnya tesis ini;

6. Khusus kepada kedua orang tua dan keluarga di rumah yang dengan sabar terus memberikan doa, mendorong dan memberi semangat baik moril maupun materil sehingga dapat terselesaikannya penelitian tesis ini.

7. Serta semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Semoga Allah SWT, selalu memberikan petunjuk dan balasan yang berlimpah atas bantuan dan pengorbanan yang telah diberikan dalam menyelesaikan tesis ini.

Dengan segala kemampuan yang ada serta mengingat terbatasnya pengalaman dan pengetahuan, sepenuhnya disadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Semoga tesis ini dapat berguna dan memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya.



Semarang, April 2021

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Wana'.

Wana Ficky Sari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. PERUMUSAN MASALAH	9
C. TUJUAN PENELITIAN	10
D. MANFAAT PENELITIAN	10
E. METODE PENELITIAN	11
F. PENYAJIAN TESIS	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. PENGANTAR	16
B. KERANGKA PEMIKIRAN	18
1. Kerangka Konsep	18
a. Konsep Imunisasi	18

b. Konsep Asas Kemanfaatan	20
2. Kerangka Teori	21
a. Teori Imunisasi	21
b. Asas Kemanfaatan	38
C. PENUTUP	58
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. HASIL PENELITIAN	61
1. Aspek Hukum Penyelenggaraan Imunisasi	62
2. Asas Kemanfaatan	67
B. PEMBAHASAN	71
C. PENUTUP	76
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
A. KESIMPULAN	79
B. SARAN	82
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum perlu diwujudkan sesuai dengan cita-cita Bangsa Indonesia, salah satu yang harus diperhatikan yaitu mengenai kesehatan anak. Kesehatan anak dapat diwujudkan dengan penyelenggaraan imunisasi sudah dituangkan dalam Permenkes. Asas kemanfaatan pada intinya berisi nilai mewujudkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang, yang didukung dengan asas keadilan sosial dan asas kemanusiaan. Timbul pertanyaan: apakah ketentuan tentang penyelenggaraan imunisasi, menyebabkan dipenuhinya asas kemanfaatan?

Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Deskriptif dengan pendekatan Metode Penelitian Yuridis Normatif dan jenis penelitiannya adalah Studi Kepustakaan. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan menggunakan bahan pustaka, yakni berupa bahan hukum primer, sekunder dan tertier, kemudian dilakukan analisis kualitatif untuk mendapatkan jawaban sementara berupa hipotesis kerja.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi mengatur bahwa penyelenggaraan imunisasi merupakan suatu program yang sengaja memasukkan antigen lemah ke dalam tubuh manusia, agar merangsang antibodi keluar sehingga tubuh dapat resisten terhadap penyakit tertentu, upaya ini adalah upaya kesehatan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal dan upaya pencegahan primer guna menghindari terjadinya sakit atau kejadian yang dapat mengakibatkan seseorang sakit atau menderita cedera dan cacat. Penyelenggaraan imunisasi dapat dilakukan di fasilitas kesehatan Pemerintah maupun swasta dengan diawasi oleh Pemerintah cq Dinas Kesehatan Prop/Kab/Kota, serta BPPOM dalam hal penyediaan vaksin.

Asas kemanfaatan sebagai dasar hukum dari pembentukan perundang-undangan yang bertujuan memberikan kebahagiaan bagi masyarakat sesuai dengan hak sosial yang dimiliki oleh masyarakat, berdasarkan kepada mewujudkan nilai dari penghargaan terhadap kehidupan manusia yang menyeluruh dan seutuhnya. Dengan demikian berarti, bahwa manusia yang seutuhnya mendapatkan hak sosial sesuai dengan yang diberikan oleh Negara untuk mencapai kesejahteraan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.

Ketentuan tentang penyelenggaraan imunisasi bertujuan untuk menjaga kesehatan anak agar dapat sehat secara fisik, mental dan spiritual, demikian juga upaya untuk memenuhi hak sosial anak untuk hidup bebas dari penyakit menular dan menyejahterahkan masa depan anak, dengan tujuan pemenuhan pemberian kebahagiaan yang sebesar-besarnya kepada sebanyak-banyaknya orang. Dirumuskan jawaban sementara berbentuk hipotesis kerja: jika ditentukan tentang penyelenggaraan imunisasi, maka dipenuhi asas kemanfaatan.

Kata Kunci: Penyelenggaraan Imunisasi, Asas Kemanfaatan, Asas Keadilan Sosial, Asas Kemanusiaan

ABSTRACT

Health as an element of general welfare needs to be realized in accordance with the aspirations of the Indonesian Nation, one of which must be considered is the health of children. Children's health can be realized through the implementation of immunization as outlined in the Minister of health regulation. The principle of usefulness in essence contains the value of realizing the greatest possible happiness for as many people as possible, which is supported by the principle of social justice and the principle of humanity. The question arises: does the provision regarding immunization lead to fulfillment of the principle of benefit?

This research uses descriptive research methods with the juridical normative research method approach and the type of research is literature study. Secondary data collection is carried out using library materials, namely in the form of primary, secondary and tertiary legal materials, then qualitative analysis is carried out to obtain temporary answers in the form of working hypotheses.

Regulation of the Minister of Health Number 12 of 2017 concerning Implementation of Immunization regulates that the implementation of immunization is a program that deliberately inserts weak antigens into the human body, in order to stimulate antibodies to come out so that the body can be resistant to certain diseases, this effort is a preventive health effort to achieve a health degree community and primary prevention efforts to avoid the occurrence of illness or events that can cause a person to become sick or suffer injuries and disabilities. Immunization can be carried out in public and private health facilities under the supervision of the Government, in this case the Provincial / District / City Health Office, as well as BPPOM in terms of vaccine provision.

The principle of benefit is the legal basis for the formation of legislation which aims to provide happiness to the community in accordance with the social rights possessed by the community, based on realizing the value of respect for human life that is comprehensive and completely. Thus it means that human beings who fully obtain social rights in accordance with those granted by the State to achieve social welfare for all Indonesian people.

The provisions concerning the implementation of immunization aim to maintain children's health in order to be physically, mentally and spiritually healthy, as well as efforts to fulfill children's social rights to live free from infectious diseases and to prosper the child's future, with the aim of fulfilling the greatest possible happiness to as many people as possible. An interim answer is formulated in the form of a working hypothesis: if it is determined about the administration of immunization, then the principle of benefit is fulfilled.

Keywords: Implementation of Immunization, Principle of Benefit, Principle of Social Justice, Principle of Humanity